



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNIT KERJA : BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
SUB UNIT KERJA : BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MOH. NAZILI**
2. Jabatan : **KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**
3. NHK : **56706**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp. 2.600.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 110 m2/80 m2 di KOTA MATARAM ,
HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah Seluas 7.100 m2 di LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI
Rp. 710.000.000
3. Tanah Seluas 4.600 m2 di LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI
Rp. 460.000.000
4. Tanah Seluas 1.100 m2 di LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI
Rp. 275.000.000
5. Tanah Seluas 709 m2 di LOMBOK TENGAH, HASIL SENDIRI Rp.
105.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 1.000 m2/150 m2 di LOMBOK
TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 273.500.000**

1. MOBIL, TOYOTA YARIS 1,5 G Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
230.000.000
2. MOTOR, HONDA SPM R2 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
13.500.000
3. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
30.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 157.000.000****D. SURAT BERHARGA** **Rp. ---**



| | | |
|-----------------------------------|-----|---------------|
| E. KAS DAN SETARA KAS | Rp. | 103.113.134 |
| F. HARTA LAINNYA | Rp. | ---- |
| Sub Total | Rp. | 3.133.613.134 |
| III. HUTANG | Rp. | ---- |
| IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) | Rp. | 3.133.613.134 |

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **23 Januari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.